

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar modal adalah suatu pasar yang beroperasi secara terorganisir dalam suatu kegiatan perdagangan yang meliputi surat-surat berharga seperti saham, equitas, serta surat-surat pengakuan hutang yang diterbitkan oleh pemerintah. Menurut Martanela dan Malinda (2011:2), pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik surat hutang, ekuitas, reksadana, maupun instrumen derivatif dan lainnya. Sedangkan menurut UU No. 8 Tahun 1995, pengertian pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar Modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya, seperti: menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya.

Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Pengertian perusahaan umum menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 pasal 1 Tentang BUMN adalah perusahaan umum yang selanjutnya disebut dengan Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan

untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi. Perusahaan dapat diklasifikasikan dari beberapa bentuk. Salah satunya klasifikasi perusahaan berdasarkan bentuk hukumnya menurut Ross, dkk (2018:17), yaitu (1) perusahaan badan hukum seperti misalnya; Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perusahaan Umum, Perusahaan Perseroan (Persero), (2) perusahaan bukan badan hukum seperti Perusahaan Perseorangan, Perskutuan Perdata, Firma, CV.

Nilai pasar merupakan pembukuan nilai saham di pasar saham dan nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari saham. Menurut Henry (2017:5) mendefinisikan bahwa nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melewati suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu mulai dari perusahaan itu didirikan sampai saat ini. Penilaian saham perusahaan ini bertujuan agar investor mengetahui dan memahami ketiga nilai tersebut sebagai informasi penting dalam pengambilan keputusan investasi saham karena dapat membantu investor untuk mengetahui saham mana yang bisa menguntungkan dan yang tidak menguntungkan. Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting bagi suatu perusahaan, hal tersebut karena dapat meningkatkan kemakmuran pemilik dan para pemegang saham sehingga tujuan

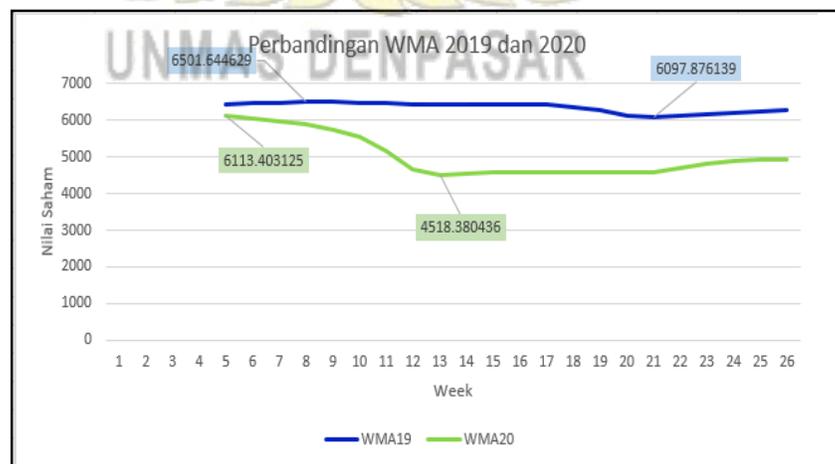
perusahaan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Menurut Husnan (2015:6), nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Sebelum investor melakukan investasi saham pada sebuah perusahaan, mereka akan membuat penilaian saham terlebih dahulu berdasarkan informasi yang mereka dapatkan dari pasar modal.

Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat investor tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan karena mereka yakin atas prospek kinerja perusahaan tersebut dan mereka yakin akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Menurut Fahmi (2015:139) nilai perusahaan pada dasarnya dapat diukur melalui beberapa aspek, salah satu ukuran atau proksi yang digunakan adalah *price book value* (PBV) atau membandingkan harga pasar per lembar saham dengan nilai buku per lembar saham. Alasan mengukur kinerja perusahaan dengan pengukuran PBV karena menurut saya PBV itu lebih efisien dan efektif untuk membandingkan rasio keuangan dengan harga saham. Disamping itu investor juga akan menilai prospek perusahaan di masa yang akan datang. Industri manufaktur merupakan salah satu industri yang memiliki prospek bagus dan menjanjikan untuk masa yang akan datang. Dengan adanya prospek bisnis yang menjanjikan maka akan menjadi daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya.

Di Indonesia, fenomena yang berhubungan dengan nilai perusahaan adalah pergerakan harga saham di Indonesia dari tahun 2019-2020 akibat dari dampak covid 19. Saham adalah salah satu instrumen pasar modal yang dapat

didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seorang atau sepihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Faktor yang terjadi sekarang dalam sektor pasar saham yaitu adanya dampak dari virus corona terhadap indeks harga saham dan arus dana asing ke pasar saham. Pasar saham dan nilai tukar ekonomi dipengaruhi oleh beberapa sektor dari dalam negeri yaitu pariwisata, sosial, dan kondisi ekonomi yang banyak memberi kontribusi bagi sektor perekonomian negara. Arus dana yang masuk dari investor asing menjadi lebih variatif karena risk appetite pasar yang menurun disebabkan melemahnya angka indeks saham dalam negeri selama pandemi corona yang memiliki dampak perekonomian. Berikut adalah gambar perbandingan WMA (*weighted moving average*) pergerakan harga saham di Indonesia dari tahun 2019-2020 akibat dari dampak covid-19:

Gambar 1.1
Perbandingan Pergerakan Harga Saham di Indonesia
Tahun 2019-2020



Sumber: www.idx.co.id

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat terlihat perhitungan indeks saham menggunakan WMA antara periode Januari sampai Juni tahun 2019 dan 2020 keduanya mengalami fluktuasi per minggunya. Grafik garis berwarna biru menunjukkan hasil WMA pada data 6 bulan indeks saham tahun 2019, sedangkan perhitungan hasil pada periode Januari sampai Juni tahun 2020 ditunjukkan oleh grafik dengan warna hijau. Kemudian untuk grafik WMA tahun 2020 akhir bulan kedua mengalami penurunan, dan bahkan lebih parahnya lagi pada bulan ketiga saham IHSG di Indonesia turun sangat signifikan jika dibandingkan dengan WMA tahun 2019, hal ini dipicu dengan diumumkannya bahwa virus Covid-19 di Indonesia sudah menyebar.

Dari Gambar diatas dapat dijelaskan perbandingan saham dari sebelum pandemi (tahun 2019) dan setelah adanya pandemi (tahun 2020) ditandai dengan adanya penurunan grafik yang sangat signifikan pada tahun 2020 dan menunjukkan penurunan harga saham perekonomian di Indonesia. Pada periode Januari-Juni 2019 adalah harga rata-rata normal indkes saham Indonesia kemudian periode Januari-Juni 2020 harga indeks saham di Indonesia mulai menurun hingga pada bulan Maret 2020. Hasil perbandingan persentase data saham IHSG tahun 2019 dan 2020 selama awal tahun sampai bulan Maret mengalami dampak penurunan saham sebesar 19,04% terhadap perusahaan salah satunya pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

Krisis ekonomi yang terjadi di Asia Timur dan negara lain terjadi bukan hanya faktor ekonomi makro, akan tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya *corporate governance* yang ada di negara tersebut, seperti lemahnya hukum,

standar akuntansi dan pemeriksaan keuangan (auditing) yang belum mapan, lemahnya pengawasan komisaris, pasar modal yang masih underregulated dan terbaikannya hak minoritas. Salah satu kasus nyata gagalnya penerapan *good corporate governance* yang terjadi dalam waktu dekat ini adalah skandal yang dialami PT Asuransi Jiwasraya (Persero), salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia. Potensi kerugian negara dari kasus tersebut hingga Agustus 2019 diperkirakan mencapai Rp13,7 triliun. Jiwasraya juga menempatkan investasi di aset reksa dana sebesar 59,1% senilai Rp 14,9 triliun dari aset finansial. Kasus ini merupakan beberapa bukti nyata lemahnya pengawasan internal dan lemahnya *corporate governace* sehingga menyebabkan terjadinya kecurangan dan kerugian yang luar biasa. Kasus ini memberikan beberapa pelajaran berharga, bahwa lemahnya implementasi *good corpotate governance* menyebabkan terjadinya kecurangan dan kerugian yang luar biasa.

Good corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Menurut Hamdani (2016:20), *corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. *Corporate governance* yang buruk juga disebutkan sebagai salah satu penyebab dari krisis ekonomi yang terjadi Asia Timur pada tahun 1997-1998, termasuk di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance*. Perusahaan perlu meyakinkan pihak penyandang dana eksternal bahwa investasi mereka digunakan secara tepat dan efisien. Manajemen juga memastikan bahwa

manajemen bertindak terbaik untuk kepentingan perusahaan. Kepastian seperti itu diberikan oleh sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*).

Di era globalisasi ini, *good corporate governance* (GCG) sudah diterapkan oleh banyak perusahaan di Indonesia. Manajer bekerja secara efektif dan efisien sehingga dapat menurunkan biaya modal dan mampu meminimalkan risiko. Usaha tersebut diharapkan menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Kinerja perusahaan akan baik jika perusahaan mampu mengendalikan perilaku para eksekutif puncak perusahaan untuk melindungi kepentingan pemilik perusahaan (pemegang saham), salah satunya dengan keberadaan komite audit. Komite audit diharapkan mampu mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal dan mengawasi sistem pengendalian internal sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: 117/MMBU/2002.

Ciri utama dari lemahnya *corporate governance* adalah adanya tindakan mementingkan diri sendiri di pihak para manajer perusahaan dengan mengabaikan kepentingan investor. Dengan demikian, hal tersebut akan mengakibatkan aliran masuk modal (*capital inflows*) ke suatu negara mengalami penurunan sedangkan aliran keluar (*capital outflows*) dari suatu negara mengalami kenaikan. Akibat selanjutnya adalah menurunnya harga-harga saham di negara tersebut, sehingga pasar modalnya menjadi tidak berkembang dan menurunnya nilai pertukaran mata uang negara tersebut.

Struktur *corporate governance* di Indonesia sesuai dengan UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dimana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah badan tertinggi yang terdiri atas pemegang saham yang memiliki

hak memilih anggota dewan komisaris. Jumlah anggota dewan komisaris yaitu minimal 2 orang untuk perusahaan yang telah go publik. Sedangkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan Surat Edaran No. SE-03/PM/2000 mensyaratkan bahwa setiap perusahaan publik di Indonesia wajib membentuk komite audit dengan anggota minimal 3 orang yang diketuai oleh satu orang komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

Terdapat beberapa mekanisme *good corporate governance* yang mempengaruhi nilai perusahaan, diantaranya adalah kepemilikan manajerial. Menurut Christiawan dan Torigan (2014:6) menyatakan kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini dipresentasikan besarnya presentase kepemilikan oleh manajer. Kepemilikan manajerial ini diukur dengan proporsi saham yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun dan dinyatakan dalam presentase. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah mereka sendiri.

Hasil penelitian Ridho dan Irfa (2016), Aprianda dan Suardikha (2016), Kintan dan Margaretha (2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sementara penelitian Budianto dan Payamta (2014), Suastini, dkk (2016), Wibowo (2016) memperoleh bahwa

kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian Warapsari dkk (2016), Febriani (2016), Dewi dan Sanica (2017) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang dikarenakan sedikitnya kepemilikan saham manajemen sehingga kurangnya kontribusi pada pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Mekanisme *good corporate governance* yang kedua yaitu kepemilikan institusional. Menurut Pasaribu (2016:156), kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan. Kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan persentase. Variabel kepemilikan institusional diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki institusi lain di luar perusahaan minimal 10% terhadap total saham perusahaan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan.

Penelitian Soni (2016), Surjadi dkk (2017), Lestari (2017), Wardhani dkk (2017) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian Rahma (2014), Widowati (2016), Azizah (2019) meneliti bahwa kepemilikan institusional

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian Nurgahanti (2014), Dewi dan Sanica (2017) mendapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional atau kepemilikan saham oleh pihak luar perusahaan tidak mempengaruhi nilai perusahaan.

Mekanisme *good corporate governance* selanjutnya adalah komiaris independen. Menurut (Sukrisno dan Cenik, 2014:110) komisaris independen merupakan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian professional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan pertanggungjawaban dewan komisaris yang meliputi penyusunan tujuan strategi perusahaan, penyediaan kepemimpinan yang berpengaruh, pengawasan manajemen atas bisnis yang berjalan dan memastikan perusahaan menjalankan tata kelola perusahaan sebagaimana mestinya serta melaporkan hasilnya kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam masa kepengurusannya.

Penelitian yang di lakukan oleh Chintia (2014), Sarfina dan Salsabila (2017), Nuryono (2019) yang menyatakan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang menyatakan keberadaan komisaris independen dalam perusahaan dapat memantau dan meningkatkan perusahaan dalam melakukan *good corporate governance*. Penelitian Putra (2016), Fadillah (2017), Syafitri (2018) membuktikan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh Rachmania (2017), Krisnando dan Sakti (2019), Rosalina (2019) membuktikan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Mekanisme *good corporate governance* yang terakhir yaitu komite audit. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan OJK 55/2015, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit ialah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama transparansi dan disclosure yang diterapkan secara konsisten dan memadai.

Komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa komite audit ialah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan agar dapat terciptanya efektifitas pengendalian dalam pengelolaan manajemen. Penelitian Sutrisno dan Indriastuti (2018), Wijayanti (2019), Samrotum (2019) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian Muryati dan Suardikha (2014), Yunita (2017), Sholehah (2018) yang membuktikan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Tetapi penelitian Amrizal dan Rohmah

(2017), Marini dan Marina (2017), Rahmawati (2018) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian ini ingin mengungkap kembali apakah komposisi mekanisme *good corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institutional, komposisi dewan komisaris independen dan komite audit ini berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Alasan pemilihan objek penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memiliki skala yang besar jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya, dengan demikian peneliti dapat melakukan perbandingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Oleh karena itu penelitian ini mengangkat judul **“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institutional, Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia”**.

UNMAS DENPASAR

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah kepemilikan institutional berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang di telah diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan
2. Untuk menguji apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan
3. Untuk menguji apakah komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan
4. Untuk menguji apakah komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi teman-teman mahasiswa dan pihak-pihak lain yang akan menyusun skripsi atau yang akan melakukan penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan dan para pemegang saham yang ingin menerapkan konsep *corporate governance* terhadap peningkatan nilai perusahaan, khususnya bagi perusahaan manufaktur. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan kepada para pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

1.4.2 Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis yaitu untuk :

1. Memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Sebagai pijakan atau referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang disebabkan karena pihak-pihak yang menjalin kerja sama dalam suatu perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda, dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam mengelola suatu perusahaan. Konsep teori keagenan menurut Supriyono (2018:63) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Teori keagenan ini muncul ketika terjadi sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Seorang manajer (*agent*) akan lebih mengetahui mengenai keadaan perusahaannya dibandingkan dengan pemilik (*principal*).

Dalam teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Menurut Scott (2015:358), teori keagenan merupakan cabang dari gametheory yang mempelajari skema dari kontrak untuk memotivasi agen yang rasional untuk bertindak sesuai keinginan dari principal. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Ichsan, 2016:6). Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka

agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal. Berkaitan dengan masalah keagenan, *good corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Teori keagenan oleh beberapa asumsi yang dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu asumsi sifat manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menurut Eisenhardt dan Siagian (2011:11), menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*selfinterest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas, dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen.

Asumsi informasi adalah informasi sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/capital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer. Biaya keagenan dalam tiga jenis, yaitu:

- a. Biaya monitoring (*monitoring cost*), pengeluaran biaya yang dirancang untuk mengawasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh agen.
- b. Biaya bonding (*bonding cost*), untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak yang dapat merugikan principal, atau untuk meyakinkan bahwa principal akan memberikan kompensasi jika dia benar-benar melakukan tindakan yang tepat.
- c. Kerugian residual (*residual loss*), merupakan nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami oleh principal sebagai akibat dari perbedaan kepentingan.

2.1.2 Teori Sinyal (*Signaling Teori*)

Signalling theory atau teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal (Jama'an dan Suryani, 2015:30). Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor, kreditor). Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang.

Teori sinyal dikembangkan dalam ilmu ekonomi dan keuangan untuk memperhitungkan kenyataan bahwa orang dalam (*insiders*) perusahaan pada umumnya memiliki informasi yang lebih baik dan lebih cepat

dibandingkan dengan investor luar. Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai pihak, termasuk manajemen perusahaan itu sendiri. Namun yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan sebenarnya adalah para pengguna eksternal (diluar manajemen). Para pengguna internal (para manajemen) memiliki kontak langsung dengan entitas atau perusahaannya dan mengetahui peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi, sehingga tingkat ketergantungannya terhadap informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal.

Hubungan teori sinyal dengan nilai perusahaan adalah pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin memperluas pengungkapan dalam laporan tahunan. Hal ini merupakan sinyal positif yang diberikan perusahaan kepada investor. Makin luasnya pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan akan menambah informasi yang diterima investor. Semakin luasnya informasi yang diterima investor akan meningkatkan tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan. Dengan tingkat kepercayaan yang tinggi tentunya investor akan memberikan respon yang positif terhadap perusahaan berupa pergerakan harga saham yang cenderung naik. Berdasarkan teori sinyal, perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pelaporannya dengan mengirimkan

sinyal melalui laporan tahunan nya (Leland dan Pyle dalam Scott, 2012:475). Dengan demikian tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan akan berpengaruh pada pergerakan harga saham yang cenderung naik pada gilirannya juga akan mempengaruhi volume saham yang diperdagangkan. Dengan pergerakan harga saham yang cenderung meningkat tentunya akan berpengaruh terhadap meningkatnya return saham perusahaan.

Asumsi utama dalam teori sinyal adalah bahwa manajemen mempunyai informasi yang akurat tentang nilai perusahaan yang tidak diketahui oleh investor luar, dan manajemen adalah orang yang selalu berusaha memaksimalkan insentif yang diharapkan (Huston, 2014:186). Artinya, manajemen umumnya mempunyai informasi yang lebih lengkap dan akurat dibanding dengan pihak diluar perusahaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Asimetri informasi akan terjadi jika manajemen tidak secara penuh menyampaikan semua informasi yang diketahuinya tentang semua hal yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan ke pasar modal.

Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan memberikan signal pada pihak luar, sehingga jika manajemen menyampaikan suatu informasi ke pasar, maka umumnya

pasar akan merespon informasi tersebut sebagai suatu signal yang dapat berupa goodnews atau badnews terhadap adanya peristiwa (*event*) tertentu yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan yang tercermin dari perubahan harga dan volume perdagangan saham yang terjadi.

2.1.3 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi (Sudana, 2011:23). Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting bagi suatu perusahaan. Hal ini karena dapat meningkatkan kemakmuran pemilik dan para pemegang saham sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat investor tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Sebelum investor melakukan investasi saham pada sebuah perusahaan, mereka akan membuat penilaian saham terlebih dahulu berdasarkan informasi yang mereka dapatkan dari pasar modal. Menurut Sartono (2010:487), nilai Perusahaan adalah nilai jual sebuah perusahaan sebagai suatu bisnis yang sedang beroperasi. Adanya kelebihan nilai jual diatas nilai likuidasi adalah nilai dari organisasi manajemen yang menjalankan perusahaan itu.

Nilai perusahaan pada dasarnya dapat diukur melalui beberapa aspek, salah satu ukuran atau proksi yang digunakan adalah *price book value* (PBV) atau membandingkan harga pasar per lembar saham dengan nilai buku per lembar saham (Weston dalam Kasmir, 2014:106-107). Penetapan

price book value sebagai proksi adalah mengikuti penelitian tentang nilai perusahaan. *Price book value* mencerminkan penilaian investor atas setiap ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan.

Price to book value (PBV) menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Makin tinggi rasio ini, berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut (Brigham dan Houston, 2016:112). PBV juga menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. Alasan mengukur kinerja perusahaan dengan pengukuran PBV karena menurut penulis PBV itu lebih efisien dan efektif untuk membandingkan rasio keuangan dengan harga saham. Disamping itu investor juga akan menilai prospek perusahaan di masa yang akan datang.

Industri manufaktur merupakan salah satu industri yang memiliki prospek bagus dan menjanjikan untuk masa yang akan datang. Dengan adanya prospek bisnis yang menjanjikan maka akan menjadi daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Untuk perusahaan-perusahaan yang berjalan dengan baik, umumnya rasio ini mencapai diatas satu, yang menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya. Semakin besar rasio PBV semakin tinggi perusahaan dinilai oleh para pemodal relatif dibandingkan dengan dana yang telah ditanamkan di perusahaan.

2.2.4 *Good Corporate Governance (GCG)*

Corporate governance adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan (Agoes, 2011:101). Mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari perseroan tersebut, serta hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu mulai dari rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, komisaris, juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan yang pada hakekatnya merupakan stakeholders dari perseroan, yaitu negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan, dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik), calon investor, kreditor dan calon kreditor perseroan.

Good corporate governance secara umum dikenal sebagai suatu sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan stakeholders, seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas (Tunggal, 2014:24). Prinsip *good corporate governance* ini dapat digunakan untuk melindungi pihak - pihak minoritas dari pengambil alih yang dilakukan oleh para manajer dan pemegang saham dengan mekanisme legal. *Corporate governance* menurut *The Indonesian Institute for*

Corporate Governance (IICG) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain.

Corporate governance menurut *Forum For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2012:55) didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Prinsip-prinsip dari *corporate governance* yang menjadi indikator, sebagaimana dijelaskan dalam buku pedoman *good corporate governance* pada PTSB (2013:2) adalah:

a. *Transparancy* (Transparansi)

Transparansi adalah adanya pengungkapan suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat dibandingkan dengan keadaan yang menyangkut tentang keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang materil dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemakai kepentingan.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Responsibility (Pertanggungjawaban) adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini mewujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika dan memelihara bisnis yang kuat.

d. Independensi (independen)

Untuk melancarkan asas *corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independen diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini menuntut adanya rentang kekuasaan antara

komposisi komite dalam komisaris dan pihak luar seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus obyektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihak tertentu.

e. *Fairness* (Keadilan)

Prinsip keadilan (*fairness*) merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham. Keadilan disini diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham.

2.1.5 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Sudana, 2015:4), sedangkan menurut Sartono (2010:487), kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dari seluruh modal saham dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial diasumsikan sebagai mekanisme pengendalian internal dan berfungsi sebagai monitoring positif untuk mengurangi konflik keagenan. Kepemilikan manajerial yang besar di dalam perusahaan akan efektif untuk mengawasi aktivitas perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan

keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola.

Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba (Saraswati dkk, 2016:11). Secara teoritis ketika kepemilikan manajemen rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat. Kepemilikan manajer terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen.

Penelitian yang dilakukan oleh Aprianda dan Suardikha (2016), Febiyani dan Devie (2016), Asnawi dan Ibrahim (2019), menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung bukti bahwa kepemilikan manajerial mengurangi dorongan perilaku oportunistik manajer sehingga akan mengurangi earning management dan meningkatkan kualitas laba serta konsekuensinya tentu terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diartikan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial pada perusahaan maka akan semakin mengurangi kecenderungan manajer melakukan earning management. Sedangkan penelitian Suastini (2016), Rahyuda dkk (2016), Purbawangsa (2016), Fajriah (2018) mengemukakan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai

perusahaan. Berbeda dengan penelitian Warapsari (2016), Suaryana (2016), Sari (2020) yang mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.1.6 Kepemilikan Institutional

Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai besarnya persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional atau pihak institusi (Pasaribu dkk, 2016:156). Kepemilikan institusional sebagai persentase suatu perusahaan yang memiliki mutual funds, investment banking, asuransi, dana pensiun, reksadana dan bank. Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme Corporate Governance yang kuat yang bisa digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan. Menurut Pujiati (2015:143), kepemilikan institusional adalah keadaan dimana institusi atau lembaga mempunyai saham di suatu perusahaan. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer.

Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan pada umumnya dan manajer sebagai pengelola perusahaan pada khususnya. Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor institusional dapat membatasi perilaku para manajer. Cornet, dkk (2016:16) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih

memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku opportunistik atau mementingkan diri sendiri. Kepemilikan asing meningkatkan persaingan pasar sehingga memaksa perusahaan domestik restrukturisasi lebih cepat. Restrukturisasi melalui perbaikan teknologi dan perbaikan corporate governance serta perubahan jangkauan dan kualitas barang yang diproduksi.

Penelitian Wibowo (2016), Lestari (2017), Nurkin dan Wahyudin (2017), Surjadi dkk (2017), Fajriah (2018) mengemukakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian penelitian Rahma (2014), Widowati (2016), Azizah (2019) meneliti bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara negatif terhadap nilai perusahaan. Berbeda pula dengan penelitian Permanasari (2010), Dewi dan Sanica (2017), Sari (2020) mendapatkan hasil bahwa Kepemilikan institusional atau kepemilikan saham oleh pihak luar perusahaan tidak mempengaruhi nilai perusahaan.

2.1.7 Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan

perseroan. Menurut Sukrisno dan Cenik (2014:110) komisaris independen merupakan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.

Dewan komisaris independen berperan sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan dewan komisaris. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Menurut Sari dan Sugiarto (2014:26) dewan komisaris adalah suatu kelompok individu yang dipilih oleh pemegang saham yang menjalankan tugas legal untuk menetapkan tujuan-tujuan perusahaan. Selain itu dewan komisaris memiliki kewajiban untuk mengawasi kinerja dewan direksi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dari dewan direksi. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 disebutkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris minimal 3 orang atau paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi.

Dewan komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen, dan minimal 50% dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen. Penelitian yang dilakukan oleh Sarfina dan Salsabila (2017), Marina (2017), Dewi (2015), dan Nurgahanti (2015) yang menyatakan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang menyatakan Keberadaan komisaris

independen dalam perusahaan dapat memantau dan meningkatkan perusahaan dalam melakukan *good corporate governance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuryono dan Wijayanti (2019), Samrotum (2019), Putra (2019) mendapatkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmania (2017), Rosalina (2019), Hafizah (2020) mengemukakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.1.8 Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* diterapkan secara konsisten dan memadai (Hartono, 2014:20). Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat yang anggotanya diangkat dan dihentikan oleh dewan komisaris perusahaan tercatat untuk membantu melakukan pemeriksaan yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat.

Keanggotaan komite audit sesuai dengan peraturan BEI adalah sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota. Seorang diantaranya adalah komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit. Tugas dan tanggung

jawab komite audit seperti yang diatur dalam Kep-29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- 3) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
- 4) Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
- 5) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
- 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

Adapun selain tugas dari komite audit yang telah diuraikan diatas, menurut Antonius (2011:18) komite audit juga memiliki tanggung jawab, antara lain adalah:

- 1) Memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, dan rencana jangka panjang.

- 2) Memastikan perusahaan dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, dan melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
- 3) Mengawasi perusahaan termasuk didalamnya pemahaman tentang masalah yang berpotensi mengandung resiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

Manfaat komite audit (Effendi, 2016:37) yang dibentuk sebagai komite khusus dipusahaan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan yang sebelumnya merupakan tanggung jawab penuh dari dewan komisaris serta bermanfaat untuk memberdayakan fungsi komisaris dalam melakukan pengawasan. Komite audit yang efektif akan membantu terciptanya keterbukaan serta laporan keuangan yang berkualitas, ketaatan pada peraturan-peraturan yang berlaku, dan pengawasan internal yang memadai. Penelitian yang dilakukan oleh Perdana dan Raharja (2014), Tambunan dkk (2017), Laily (2019), Rosalina dan karuntu (2019) mendapatkan hasil bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian Muryati (2014), Suardikha (2014), Indrastuti (2021) menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian Sianturi dan Ratnaningsih (2016), Marini dan Marina (2017), Amrizal dan Rohmah (2019), Hafizah (2020) yang

mendapatkan hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian Martiana (2020) dengan judul “*Pengaruh GCG terhadap Nilai Perusahaan dan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Mediasi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI tahun 2016-2018*”. Penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan institutional sebagai proksi variabel independen dan teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa GCG dengan proksi variabel kepemilikan institutional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Penelitian Asnawi dkk (2019), dengan judul “*Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institutional, Dan Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2014-2019*”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institutional, dan kebijakan hutang, sedangkan variabel dependennya adalah nilai perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan kepemilikan institutional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Penelitian Fitriyani (2019) dengan judul “*Pengaruh GCG dan Lverage Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai variabel pemoderasi (Studi Empiris pada perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017)*”. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu kepemilikan institutional, kepemilikan publik, komite audit, direksi, dan komisaris independen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa GCG yang dipresentasikan dengan komite audit dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Penelitian Ulfa (2019) dengan judul “*Pengaruh Penerapan GCG Terhadap Nilai Perusahaan dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Properti&Real Estate di Bursa Efek Indonesia*”. Variabel dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institutional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit sebagai variabel independen. Dan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kepemilikan institutional, dewan komisaris independen, dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Serta hasil lain menunjukkan bahwa manajemen laba bukanlah variabel pemoderasi dalam pengaruh variabel independen terhadap nilai perusahaan pada penelitian ini.

Penelitian Poulan dan Wicaksono (2019), menggunakan judul “Pengaruh pengungkapan GCG terhadap nilai perusahaan pada BUMN yang terdaftar di BEI periode 2013-2017”. Variabel yang digunakan yaitu nilai perusahaan sebagai variabel dependen dan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit sebagai variabel independen. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan hanya variabel kepemilikan institusional yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan ketiga variabel yang lain yaitu kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Penelitian Syafitri dkk (2018) dengan judul “*Pengaruh GCG Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Industri sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016)*”. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu komite audit, kepemilikan manajerial, dan dewan direksi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan sedangkan variabel Komite audit berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Penelitian Rahmadani dan Rahayu (2017) dengan judul “*Pengaruh GCG, Profitabilitas dan leverage terhadap Nilai*

Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015”). Penelitian ini menggunakan variabel GCG yaitu kepemilikan institutional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Penelitian Nurfaza (2017) dengan judul *“Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015”)*, dengan variabel dependen yaitu Nilai perusahaan dan variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian Sabrina dkk (2017) dengan judul *“Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Sub Sektor Food and Beverages yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2015)”*. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu nilai perusahaan dan variabel independennya kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Hasil dari

penelitian ini yaitu seluruh variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan tetapi variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian Saenong (2017) dengan judul *“Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)”*, dengan variabel dependen nilai perusahaan dan ukuran perusahaan dan variabel independen dewan komisaris, komisaris independen, dan dewan direksi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Penelitian ini mendapatkan hasil yaitu dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol sehingga hipotesis pertama diterima. Dan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol sehingga hipotesis diterima. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan sehingga hipotesis kedua diterima.

Penelitian Pratiwi (2017), dengan judul penelitian yaitu *“Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Food And Beverage yang Listing di BEI”*. Dengan variabel dependen *good corporate*

governance yang digunakan yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institutional, komisaris independen, dan dewan direksi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran perusahaan dan indikator *good corporate governance* secara simultan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan secara parsial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Penelitian Pradnyaswari dan Putri (2016), dengan judul “*Pengaruh Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan di Koperasi di Kabupaten Klungkung*”. Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu kinerja keuangan dan variabel independen yaitu transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* berpengaruh positif pada kinerja keuangan koperasi di kabupaten Klungkung.

Penelitian Sianturi dan Ratnaningsih (2016), dengan judul “*Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi empiris pada Perusahaan Perbankan Pertambangan yang Terdaftar di BEI tahun 2010-2015)*”. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institutional, komisaris independen, komite audit, dan

variabel dependennya yaitu nilai perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan GCG melalui variabel kepemilikan institutional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, namun kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Penelitian Putra (2016), dengan judul *“Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2009-2013”*. Variabel yang digunakan yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institutional, komisaris independen, dewan direksi sebagai variabel independen, dan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institutional, komisaris independen, dan dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Penelitian Wibowo (2016) dengan judul *“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institutional, Kebijakan Dividen, dan Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2010-2014”*. Variabel yang digunakan yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institutional, kebijakan dividen, dan kebijakan hutang sebagai variabel

independen, dan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, kepemilikan institutional berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, kebijakan dividen dan kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjadi referensi dan dapat mengisi kekosongan sekaligus sebagai teori yang baru dan wawasan kajian teoritis. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang pengaruh indikator variabel *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan dan beberapa penelitian sebelumnya juga menggunakan metode penelitian mengidentifikasi data perusahaan seperti populasi dan sampel pada Bursa Efek Indonesia sebagai alat pengumpulan data. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, beberapa penelitian sebelumnya menggunakan variabel x sebanyak 3 dan lebih dari 5 variabel x, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel x, perbedaan selanjutnya terletak pada metode penelitian karena beberapa penelitian sebelumnya menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data, perbedaan pada objek penelitian, dan

juga waktu penelitian. Adapun ringkasan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 Lampiran 1.

